



DINAS SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024

*Jl. Brigjen Piola Isa Kelurahan Dulalowo Selatan Kecamatan Kota Utara
Kota Gorontalo*

Email: dinsosprovgto34@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Laporan kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024. LAKIP Dinas Sosial, Provinsi Gorontalo Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, tingkat pencapaian yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat secara keseluruhan

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gorontalo, Februari 2025

KEPALA DINAS

SAGITA WARTABONE, ST, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197112052002122006

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga miskin dan rentan melalui pendampingan dan penyediaan kebutuhan dasar
2. Sasaran peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan
3. Sasaran peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya
4. Sasaran kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo ke depan, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan peraturan tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan koordinasi antara pihak yang terkait agar pengevaluasian terhadap program-program yang telah dijalankan dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan
3. Mengoptimalkan pembinaan kepada PMKS dengan sumberdaya yang ada

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui usulan penambahan pegawai PNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang lebih profesional baik untuk pegawai PNS dan non PNS
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan
6. Lebih meningkatkan kinerja PNS dan Non PNS untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
LAMPIRAN:	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. STRUKTUR ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
C. ISU STRATEGIS.....	6
D. KEADAAN PEGAWAI.....	6
E. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	14
F. KONDISI KEUANGAN	15
G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	21
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	24
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	26
F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024.....	28
G. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS.....	28
H. INSTRUMEN PENDUKUNG.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO	35
B. REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV	72
PENUTUP	72

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	8
Jumlah Aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	8
Tabel 1. 2	9
Jumlah Aparatur di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	9
menurut tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1. 3	9
Jumlah Aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	9
menurut Komposisi Struktur Administrasi	9
Tabel 1. 4	14
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	14
Tahun 2024.....	14
Tabel 2. 1	22
Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	22
Tahun 2023-2026.....	22
Tabel 2. 2	24
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	24
tahun 2023-2026	24
Tabel 2.3	Error! Bookmark not defined.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Error! Bookmark not defined.
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	Error! Bookmark not defined.
Tahun 2023-2026.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 4	28
Target Belanja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2024.....	28
Tabel 2. 5	29
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial	29
Provinsi Gorontalo.....	29
Tabel 3. 1	35
Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3. 2	36
Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	36
Tahun 2024.....	36
Tabel 3. 3	37
Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	Error! Bookmark not defined.
Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 4	38
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Sosial.....	38
Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target	38
jangka Menengah dalam Dokumen Renstra	38
Tabel 3. 5	43
Analisis Efisiensi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	43

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

DAFTAR GAMBAR

Catalog

Gambar 1.1	4
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	4
Gambar 1. 2	10
Grafik Pejabat Struktural Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024	10
Gambar 1. 3	11
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024	11
Gambar 1. 4	12
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	12
Gambar 1. 5	13
Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024	13
Gambar 2. 1	31
Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo	31
Gambar 2. 2	32
Aplikasi Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	32
Gambar 2. 3	33
Aplikasi E- Data Sektor.....	33
Gambar 2. 4	34
Aplikasi new-siransija	34
Gambar 2. 5	34
Aplikasi e-JPS	34

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

LAMPIRAN:

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2023-2026

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun
Sebelumnya

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
2. Mendorong Dinas Sosial Provinsi Gorontalo di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Provinsi Gorontalo di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

A. STRUKTUR ORGANISASI

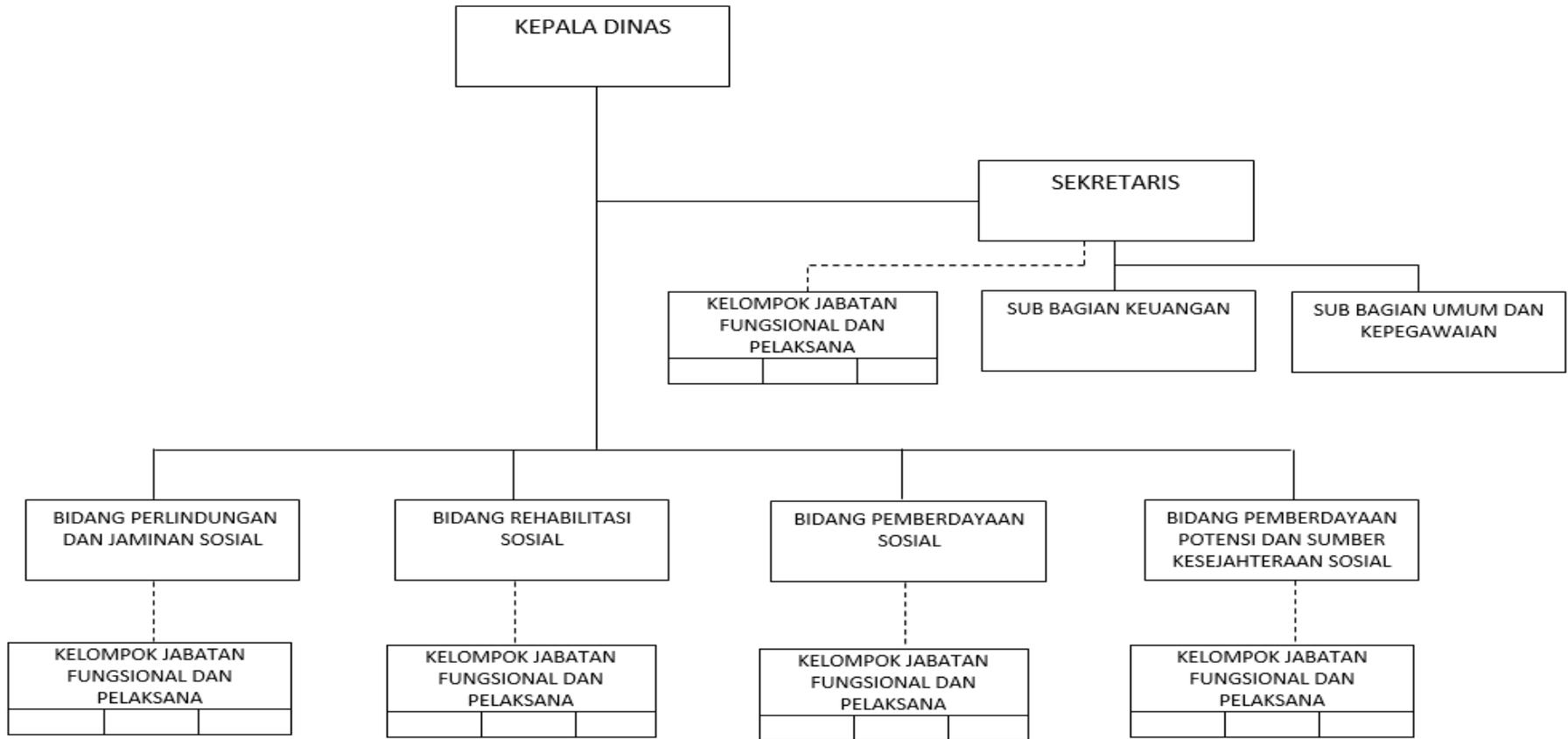
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial
- f. Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo



4

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang terbentuknya Provinsi Gorontalo maka dibentuklah Badan, Dinas dan Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kelembagaan dan Kemitraan yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Sosial
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. Pelaksanaan kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dibidang sosial yang mencakup Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

- f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial, bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melalui RPD Tahun 2023-2026 diantaranya adalah :

1. Cakupan Perlindungan Sosial belum menjangkau semua kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
2. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Kapasitas dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

D. KEADAAN PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Gorontalo didukung oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo berjumlah 70. Ditinjau dari sisi jabatan maka pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terbagi dalam Jabatan Struktural dan

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Jabatan Fungsional. Adapun susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat di lihat pada table 1.1, sebagai berikut:

7

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Tabel 1. 1
Jumlah Aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

NO	JABATAN STRUKTURAL / JABATAN FUNGSIONAL	JMLH	PANGKAT/GOL. RUANG	JMLH	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda / IV c	1	S2
2	Sekretaris	1	Pembina Tingkat 1 / IV b	1	S1
3	Kepala Bidang	3	Pembina Tingkat 1 / IV b	1	S2
			Pembina Tingkat I / IV b	1	S1
			Pembina IV / a	1	
4	Kepala Sub Bagian	2	Penata Tkt 1/ III d	2	SI
			Penata / III c		
5	Jabatan Fungsional	13	Pembina /IV a	2	S2
			Penata Tkt I / III d	1	
			Penata Muda Tkt I / III b	1	
			Penata Tkt I / III d	9	S1
6	Pelaksana	49	Pembina Tingkat 1 / IV b	1	S2
			Pembina / IV a	2	S2
			Penata Tkt. I/ III d	1	S2
			Penata Tkt. I/ III d	14	S1
			Penata / III c	11	S1
			Penata Muda Tingkat I / III b	7	S1
			Penata Muda Tingkat I / III b	1	D III
			Penata Muda / III a	5	S1
			Pengatur Tingkat I/ II d	3	SMA/SEDERAJAT
			Pengatur / II c	2	SMA/SEDERAJAT
			Pengatur Muda Tkt 1/ II b	1	SMA/SEDERAJAT
			Pengatur Muda/ II a	1	SMA/SEDERAJAT

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Sosial 2024

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Tabel 1. 2
Jumlah Aparatur di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
menurut tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	-
2	Strata 2	11 Orang
3	Strata 1	45 Orang
4	Diploma/D3	1 Orang
5	Diploma/D1	-
6	SMU/Sederajat	12 Orang
7	SMP/Sederajat	-
	Jumlah	69 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Sosial 2024

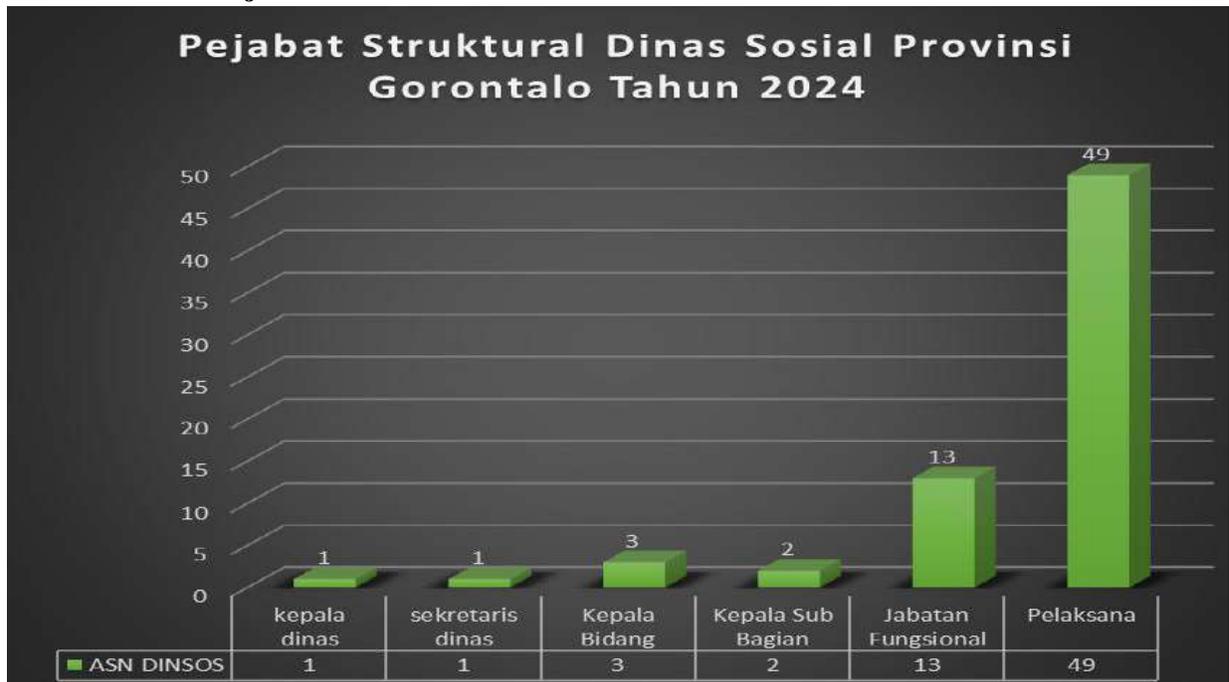
Tabel 1. 3
Jumlah Aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
menurut Komposisi Struktur Administrasi

No	Komposisi Struktur Administrasi	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretariat	20 Orang
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	13 Orang
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	13 Orang
5	Bidang Pemberdayaan Sosial	13 Orang
6	Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	9 Orang
	Jumlah	69 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Sosial 2024

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Gambar 1. 2
Grafik Pejabat Struktural Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terutama untuk Jabatan Fungsional Umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Gambar 1. 3
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa rata-rata golongan



Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Selanjutnya, profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 4
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024

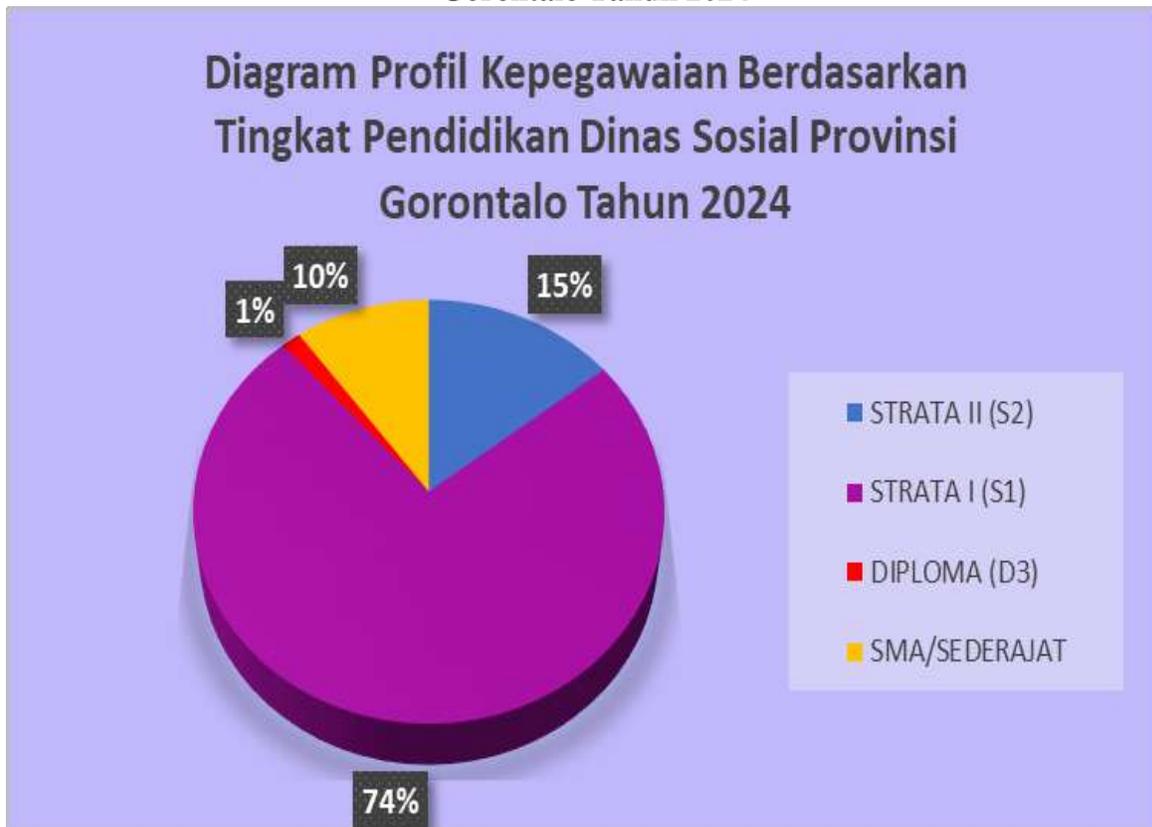


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), dan fungsional umum jumlahnya sudah seimbang.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Profil kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.5, sebagai berikut:

Gambar 1. 5
Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 terkait dengan jabatan struktural dan pelaksana yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

E. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di - Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 4
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1.	Televisi	5 Buah	Baik
2	CCTV	1 Unit	Baik
3	Komputer	15 Unit	Baik
4	Lemari Besi	8 Buah	Baik
5	Alat Pemadam Kebakaran	3 Buah	Baik
6	Kursi Tamu	2 Set	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

F. KONDISI KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 26.592.018.017,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 8.307.739.661,- dan belanja langsung sebesar Rp 18.284.278.356,- Belanja tidak langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 8.307.739.661,- yang didukung oleh 8 Program dan 18 Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Bab I (PENDAHULUAN)

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LAKIP

Bab II (PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA)

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN)

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

Bab IV (PENUTUP)

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Memasuki Tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan manifestasi komitmen Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022).

RPD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama empat tahun, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 70 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode empat tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

2023-2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo , maka Visi pembangunan tahun 2017-2023 yang ingin dicapai adalah :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera

Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Gorontalo menyampaikan misi:

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan.
2. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah.
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil.
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a) Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo maka tujuan terhadap rencana strategis yang ingin dicapai pada empat tahun mendatang meliputi :

1. Pemenuhan hak sosial dasar masyarakat
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

a) Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selang tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat
2. Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD

❖ **Sasaran Strategis**

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun melingkupi beberapa aktivitas kinerja yang dapat diungkapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat

Pelindungan sosial kepada warga miskin meliputi :

- Pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada penduduk miskin;
- Penanganan bagi fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemberian bantuan sembako;
- Pemberian pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin melalui bantuan stimulan usaha ekonomi produktif;
- Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diantaranya penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, gelandangan dan pengemis, korban penyalahgunaan NAPZA, dan penyandang HIV/AIDS.
- Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga,

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS, maupun LKS asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan

- Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan bencana sosial serta bencana nonalam sehingga terganggu fungsi sosialnya

2. Meningkatnya kualitas Tata kelola Pemerintahan yang meliputi:

- Meningkatnya kualitas urusan Penunjang Pemerintahan OPD
- Indeks Kepuasan Masyarakat

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Tabel 2. 1
Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	<p>Pelindungan sosial kepada warga miskin meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada penduduk miskin; Penanganan bagi fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemberian bantuan sembako; Pemberian pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin melalui bantuan stimulan usaha ekonomi produktif; Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diantaranya penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, gelandangan dan pengemis, korban penyalahgunaan NAPZA, dan penyandang HIV/AIDS. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS, maupun LKS asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

<p>2.</p>	<p>Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>berkelanjutan f. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan bencana sosial serta bencana nonalam sehingga terganggu fungsi sosialnya</p> <p>IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat di tetapkan melalui survey kepuasan masyarakat, yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan nilai per unsur dan jumlah responden</p>
-----------	--	-----------------------------------	--

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Tujuan dan sasaran Strategis tersebut maka uraian Indikator Kinerja Utama mewujudkan Strategis yang telah ditetapkan, seperti pada table berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan
1.	Meningkatnya Perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	<p>Pelindungan sosial kepada warga miskin meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada penduduk miskin; h. Penanganan bagi fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemberian bantuan sembako; i. Pemberian pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin melalui bantuan stimulan usaha ekonomi produktif; j. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diantaranya penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, gelandangan dan pengemis, korban penyalahgunaan NAPZA, dan penyandang HIV/AIDS. k. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS, maupun LKS asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan l. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan bencana sosial serta bencana nonalam sehingga terganggu fungsi sosialnya <p>Rumus :</p> <p>Jumlah warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">x</p>

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

			<p>100 %</p> <p>Jumlah warga miskin yang membutuhkan perlindungan sosial</p> <p>Jumlah anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial didalam panti</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">×</p> <p>100 %</p> <p>Jumlah anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis yang membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti</p> <p>Jumlah PSKS perseorangan yang meningkat kapasitasnya</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">×</p> <p>100 %</p> <p>Jumlah PSKS perorangan yang ada</p> <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">×</p> <p>100 %</p> <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ada</p>
2.	Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>-IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat di tetapkan melalui survey kepuasan masyarakat, yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan nilai per unsur dan jumlah responden. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permenpan RB No 14 Tahun 2017.</p> <p>rumus :</p> <p>Skor KM Total = $(Total\ nilai\ semua\ unsur) / (jlh\ responden \times jlh\ unsur) \times 100 / 4$</p> <p>Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</p>

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang menjadi pemicu dalam pencapaian target dan realisasi apa yang telah direncanakan dalam organisasi. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP).

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan SKPD atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Gubernur Gorontalo dan Kepala Dinas dapat dilihat dalam lampiran pada akhir laporan kinerja ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat	Persentase (%) Masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial	100%

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 26.592.018.017,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.307.739.661,- dan Belanja Langsung Rp 18.284.278.356,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp 26.592.018.017,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 8.307.739.661,- dan Belanja Langsung Rp 18.284.278.356,-

Target Belanja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp 26.592.018.017,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 8.307.739.661,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 18.284.278.356,-

Tabel 2. 4

Target Belanja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja tidak langsung	Rp 8.307.739.661,-	98.82
2	Belanja langsung	Rp. 18.284.278.356,-	94,63
	Jumlah	Rp. 26.592.018.017,-	100

G. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

28

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Tabel 2. 5
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial
Provinsi Gorontalo

No	Sasaran	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD	
1	Dari Dana APBD	Rp 26.592.018.017,-
	Jumlah	Rp. 26.592.018.017.-

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

H. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Sosial Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana menurunnya angka kemiskinan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2023 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.

1. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (E-MONEP) dengan alamat akses <http://e-monep.gorontaloprov.go.id> Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel :



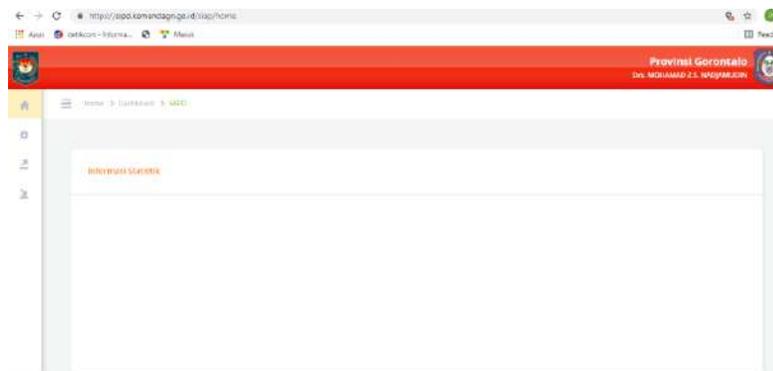
Gambar 2. 1
Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Sistem money yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam usaha Pemerintah Provinsi Gorontalo meningkatkan akuntabilitas pembangunan mampu meningkatkan performa Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan status akuntabilitas kinerja pembangunan yang baik.

2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan alamat akses <https://sipd.kemendagri.go.id/siap/login> dikembangkan mulai tahun 2020 yang merupakan pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data anggaran dengan tujuan untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan yang berasal dari semua stakeholder penyedia data.



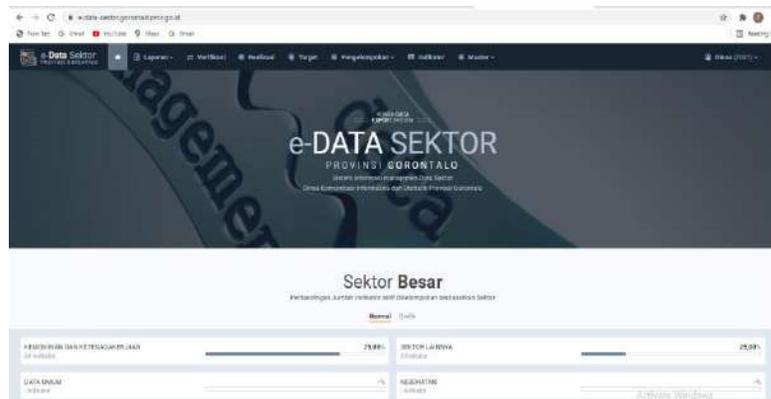
Gambar 2. 2
Aplikasi Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Sistem Aplikasi Dataku merupakan sistem pengelolaan data yang berusaha mengintegrasikan penyediaan data di masing-masing OPD sehingga mudah diakses oleh pengguna data dan mempermudah koordinasi penyediaan data untuk perencanaan dan penganggaran.

3. Sistem Informasi Manajemen Data Sektor

Sistem informasi manajemen data sector merupakan sistem yang dibangun Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Gorontalo sebagai bentuk tanggung jawab atas data sektor dari setiap OPD. setiap OPD dapat mengakses dan menginput data sektor serta metadata masing-masing pada aplikasi e-Data Sektor dengan alamat : www.e-data-sektor.gorontaloprov.go.id.



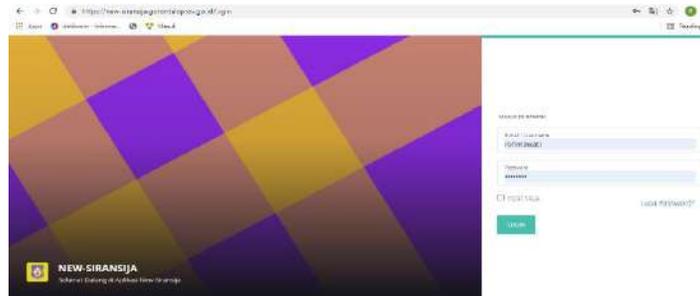
Gambar 2. 3
Aplikasi E- Data Sektor

4. Sistem Pengukuran Prestasi Kinerja (SIRANSIJA)

Sistem Pengukuran Prestasi Kinerja merupakan sistem yang dibangun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo sebagai bentuk tanggung jawab atas penilaian prestasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Gorontalo. setiap PNS dapat mengakses dan

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

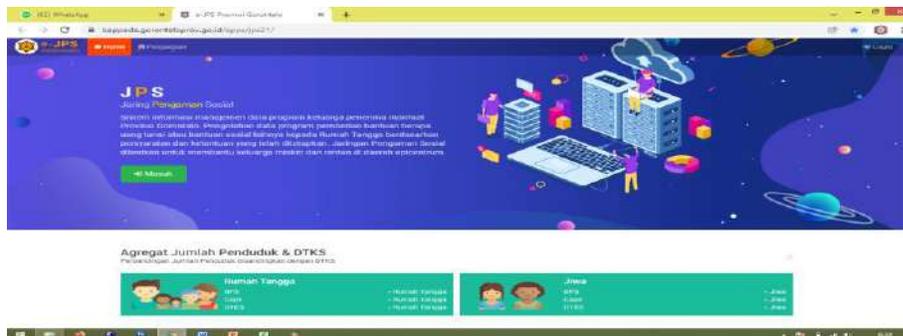
menginput sasaran kinerja pegawai sampai laporan pelaksanaan kegiatan setiap hari, dengan alamat : e-siransija.gorontaloprov.go.id yang sudah digunakan dari tahun 2017 hingga saat ini yang sudah direvisi menjadi NEW SIRANSIJA dengan alamat : new-siransija.gorontaloprov.go.id



Gambar 2. 4
Aplikasi new-siransija

5. Aplikasi E- JPS

e-JPS ini adalah Sebagai alat kontrol, monitoring dan evaluasi program bantuan sosial (Jaring Pengaman Sosial) yang di salurkan oleh pemerintah baik yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota.



Gambar 2. 5
Aplikasi e-JPS

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk penurunan angka kemiskinan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial.	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (76,61)	90,33	117,91

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian tahun 2024 dengan tahun lalu

1. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang memperoleh Perlindungan Sosial Tahun 2024 sejumlah 23.000 KPM jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 10.000 KPM x 4 Penyaluran atau Kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian dengan adanya realisasi capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi salah satu upaya

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menurunkan angka kemiskinan.

2. Realisasi Indikator Kinerja Persentase PSKS Perorangan dan Kelembagaan yang meningkat Kapasitasnya tahun 2024 sejumlah 159 Organisasi. Pada tahun 2023 tidak bisa dibandingkan karena ada perubahan Indikator Kinerja Tahun 2023.
3. Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terlayani dan tertangani Tahun 2024 sejumlah 54.094 orang (Bencana Alam), jika dibandingkan dengan tahun 2024 hanya di berikan bantuan fasilitas isi rumah bagi korban bencana sosial kebakaran sebanyak 34 KK (104 Jiwa). Untuk bencana tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memberikan memberikan bantuan Korban kebakaran.

Tabel 3. 3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian tahun 2024 dengan tahun lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	
			2023	2024
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial.	100 %	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (89,00)	A (90,33)

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja persentase angka kemiskinan dibandingkan dengan target RPD dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3. 4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial.	100 %	100 %	100
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (90,33)	A (88,31)	102

(Data sesuai Renstra Perubahan tahun 2023)

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

a. Penurunan angka kemiskinan dengan indikator Angka Kemiskinan

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya menjabarkan sasaran kinerja Pemerintah Daerah yaitu penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2024 sebesar 13,87 persen, turun 07 di bandingkan Maret 2024 sebesar 14,57 persen, turun 1,28 persen poin dari September 2023 yang berada pada angka 15,15 persen.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 170,03 ribu orang, menurun 7,96 ribu orang terhadap Maret 2024. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 4,99 persen sedangkan perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 21,62 persen, menurun 1,35 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 22,97 persen.

Dalam menurunkan angka kemiskinan baik kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan absolut di Provinsi Gorontalo, solusi yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Sosial yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G).

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

b. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial.

Capaian dari indicator kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan rentan yang memperoleh Perlindungan Sosial tahun 2024 dengan realisasi 235%, bila dibandingkan dengan realisasi sebelumnya 104,30%,

Di Indikator ini ada beberapa Program didalamnya seperti Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial

Kendala:

Belum tersedianya Panti Sosial Anak Terlantar, Lanju Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam upaya perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitas sosial untuk meningkatkan persentase dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial

Strategi

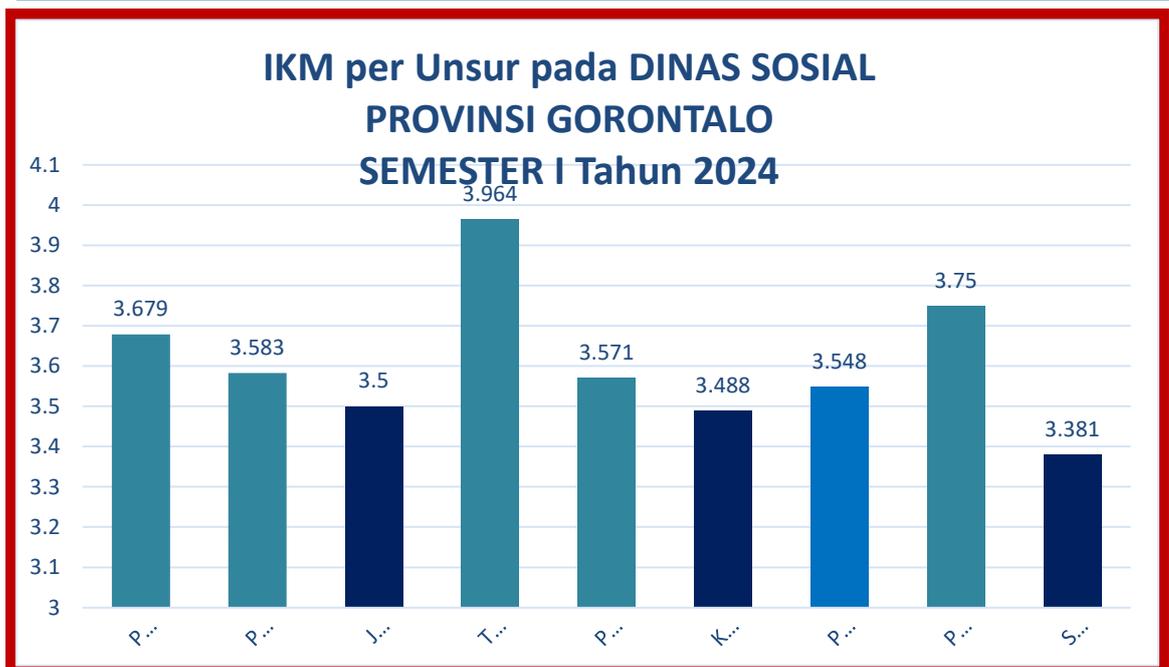
- ✓ Perlunya Pembangunan Panti Sosial Terpadu untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis.
- ✓ Untuk saat ini kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah mengupayakan dalam rangka pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti maka Pemerintah menyediakan tempat Rehabilitasi tetapi dalam status sewa/kotrak rumah.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

c. Indeks Kepuasan Masyarakat IKM

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.679	3.583	3.500	3.964	3.571	3.488	3.548	3.381	3.750
Kategori	A	A	B	A	A	B	A	B	A
IKM Unit Layanan	90.179 (A atau Sangat Baik)								



Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terkait dengan pengelolaan sumberdaya Manusia (personil/pegawai) pada Dinas Sosial pada tahun 2024 telah mengeluarkan kebijakan pengurangan sejumlah pegawai staf. Pengurangan staf ini bertujuan agar lebih mudah mengevaluasi serta mengefektifkan kinerja peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing staf/personil tanpa mengurangi tujuan terhadap target setiap kegiatan yang akan dicapai.

Implikasi terhadap kebijakan tersebut, tentunya berakibat pada mengurangi in-efisiensi penggunaan anggaran yang besar untuk membiayai gaji pegawai khususnya di tingkat staf. Dengan adanya pengurangan penggunaan anggaran tersebut, telah menunjukkan bahwa Dinas Sosial berupaya untuk terus mendorong menciptakan efisiensi penggunaan anggaran pada belanja pegawai dengan cara melakukan perampangan sejumlah staf yang tersebar di setiap bidang baik di lingkup sekretariat maupun di bidang-bidang teknis. Adanya perampangan sejumlah staf sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan sumberdaya manusia (staf/pegawai) selain memudahkan dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja staf, juga akan lebih mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran setiap program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran akan lebih mudah terealisasi sebab, perampangan jumlah staf akan mendorong adanya pembagian kerja yang jelas dan efektif sehingga staf/pegawai lebih terfokus pada peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan kegiatan dan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Tabel 3. 5
Analisis Efisiensi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian Realisasi Anggaran	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial.	100 %	99.98 %	0,02 (efisien)
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	102 %	95.46 %	6,54 (efisien)

Perhitungan tingkat efisiensi sebagaimana tabel efisiensi tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam mencapai sasaran Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi masyarakat yang realisasi kinerjanya didukung indikator kinerja utama Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial dengan berbagai program dan kegiatan, maka persentase realisasi anggaran dihitung dari rata-rata realisasi anggaran dari program yang mendukung indikator tersebut. Sementara itu, capaian kinerja adalah capaian tahun 2024 atas pencapaian target kinerja.
2. Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Urusan Sosial

✚ Program Pemberdayaan Sosial

Outcome dari program ini adalah

- Persentase PSKS perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencapai 100%
- Persentase PSKS kelembagaan sosial yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencapai 100%
- Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi mencapai 0%
- Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi mencapai 0%
- Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar mencapai 0%
- Persentase penerbitan izin penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan mencapai 100%

◆ Pelaksanaan Program :

Kegiatan : Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Output :

- Terlaksananya pengawasan dan perizinan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang (UGB dan PUB) dari target 12 sebanyak 6 Dokumen teraliasasi

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi

Output:

- Sebanyak 30 **PSM** di Kabupaten Boalemo mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugas pokok dan fungsi. Melalui kegiatan ini, para PSM mendapat kesempatan berdiskusi secara mendalam mengenai kendala lapangan serta berbagi pengalaman sukses yang dapat diterapkan kembali di wilayah kerja masing-masing. Hasilnya, PSM yang terlatih mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi

Output:

- Bimtek yang diikuti oleh **77 TKSK** Provinsi Gorontalo memberikan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pengelolaan administrasi, serta peningkatan kemampuan komunikasi. Para peserta juga dilatih untuk memahami dinamika sosial masyarakat dengan pendekatan yang berbasis data, sehingga intervensi sosial yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. TKSK kini lebih siap menjalankan peran sebagai ujung tombak pelayanan sosial di kecamatan masing-masing.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

Output:

- Terlaksananya bimbingan teknis (Bimtek) laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dikota gorontalo dan kabupaten boalemo, di ikuti oleh 92 lembaga. WKSBM 69 lembaga, karang taruna 20 lembaga dan LKSA 3 lembaga, bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial
- Terselenggaranya bimtek penguatan kapasitas karang taruna di kota gorontalo memperkuat peran mereka sebagai motor penggerak pembangunan sosial di desa dan kelurahan
- Dilaksanakannya launching dan sosialisasi SIDAK SOSIAL serta Bimtek LKS/LKSA di kota gorontalo bertujuan memperkuat system pengelolaan kesejahteraan sosial melalui penerbitan SIOP, penginputan data PMKS dan laporan TKSK. Para peserta juga mendapatkan pemahaman mendalam tentang akreditasi dan strategi peningkatan kualitas layanan.
- Terwujudnya bimtek penguatan kapasitas WKSBM berfokus pada peningkatan kemampuan majelis taklim, takmirul masjid dan rukun duka dalam merancang dan melaksanakan program kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

✚ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Outcome dari program ini adalah Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilayani mencapai 37.5%

Pelaksanaan Program :

Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Sub.Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Output :

- Terfasilitasi warga Negara migran/terlantar yang dipulangkan ke daerah asal dari target 16 orang namun terealisasi 6 orang

Penjelasan : Target tersebut tidak tercapai disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- Jumlah warga migran yang melaporkan dan ditindaklanjuti hanya 6 orang
- Kurang optimalnya koordinasi dalam penanganan warga migran

✚ Program Rehabiltasi Sosial

Outcome dari program ini adalah

- Persentase (%) penyandang disabilitas yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 40%
- Persentase (%) anak terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 100%
- Persentase (%) lanjut usia terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 100%

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

- Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 0%
- Persentase (%) PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 100%
- Persentase (%) anak yang mendapatkan orang tua angkat yang sah secara hukum mencapai 85%

Pelaksanaan Program :

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

Sub.Kegiatan : Penyediaan Permakanan

Output:

- Jumlah orang pada panti disabilitas Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan target 10 orang namun terealisasi 4 orang disabilitas, dikarenakan Panti disabilitas baru mulai beroperasi pada bulan September 2024. Sudah beberapa kali melakukan penjangkauan ke beberapa klien namun belum mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga.

Sub.Kegiatan : Penyediaan Sandang

Output:

- Jumlah orang pada panti disabilitas yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi dari target 10 orang namun terealisasi 4 orang disabilitas, dikarenakan Panti disabilitas baru mulai beroperasi pada bulan September 2024. Sudah beberapa kali melakukan penjangkauan ke beberapa klien namun belum mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Sub.Kegiatan : Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

Output:

- Tersedianya 1 unit asrama untuk 10 orang klien disabilitas

Sub.Kegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

Output:

- Tersedianya Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

Sub.Kegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari – Hari

Output:

- Jumlah orang pada panti disabilitas yang mendapatkan bimbingan aktivitas hidup sehari – hari dari target 10 orang namun terealisasi 4 orang, dikarenakan Panti disabilitas baru mulai beroperasi pada bulan September 2024. Sudah beberapa kali melakukan penjangkauan ke beberapa klien namun belum mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga.

Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

Output:

- Jumlah 2 Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

Sub.Kegiatan : Penyediaan Makanan

Output :

- Terpenuhinya kebutuhan dasar permakanan 45 Anak dalam panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sesuai dengan kewenangan provinsi dalam pemenuhan SPM yang bekerja sama

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

dengan LKSA milik masyarakat (LKSA Al Inayah, LKSA Darul Mutmain, RPSA Amal Sholeh).

Sub.Kegiatan : Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Output :

- Terpenuhinya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi 30 Anak pada 2 LKSA (LKSA Al Inayah dan LKSA Darul Mutmain).

Sub.Kegiatan : Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti

Output :

- Terpenuhinya akses ke layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti bagi 30 Anak pada 2 LKSA (LKSA Al Inayah dan LKSA Darul Mutmain).

Sub.Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

Output :

- Tersedianya 2 dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Sub.Kegiatan : Penyediaan Permakanan

Output :

- Jumlah orang pada panti lanjut usia Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Standar Gizi Minimal dengan target 23 orang terealisasi 23 orang lanjut usia.

Sub.Kegiatan : Penyediaan Sandang

Output :

- Jumlah Orang pada panti lanjut usia Kewenangan Provinsi yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun sebanyak 23 Lanjut Usia

Sub.Kegiatan : Penyediaan Asrama yang Mudah diakses

Output:

- Tersedianya 1 unit asrama untuk 23 orang lanjut usia

Sub.Kegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial

Output:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi sebanyak 23 Lansia

Sub.Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

Output:

- Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi sebanyak 23 Lansia

Sub.Kegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari

Output:

- Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi sebanyak 23 Lansia

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Sub.Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Output:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi dari target 5 orang teralisasi melebihi target yaitu sebanyak 6 Orang

Sub.Kegiatan : Pemulasaraan

Output:

- Jumlah lanjut usia yang mendapatkan Pemulasaraan sebanyak 2 Orang

Sub.Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

Output:

- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 4 Dokumen

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

Sub.Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

Output:

- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA sebanyak 3 Dokumen

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

✦ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Outcome dari program ini adalah

- Presentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100%
- Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya mencapai 100%
- Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan mencapai 75%
- Persentase (%) lembaga pemerintah / non pemerintah yang memanfaatkan DTKS dalam penyenggaraan program penanggulangan kemiskinan mencapai 35.5%

Pelaksanaan Program :

Kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Sub.Kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI

Output:

- Jumlah Anak yang mendapatkan pertimbangan izin pengangkatan orang tua asuh/orang tua angkat sebanyak 17 Anak

Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Output:

- Terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga miskin sebanyak 23.000 keluarga penerima manfaat (KPM)

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Sub.Kegiatan : Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Output:

1. Jumlah penerima bantuan UEP & PEKKA sebanyak 532 KPM (524 KPM APBD Induk & 8 KPM APBD-P) dan semuanya telah tersalurkan bantuannya (100%) dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 1.330.000.000
2. Prosentase Keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya adalah sebesar 8,8% atau 44 KPM dari jumlah 500 KPM (penerima UEP tahun 2022) yang telah dilakukan evaluasi pada tahun ini.

Sub.Kegiatan : Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Output:

Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulant mencapai 44 KPM (dari jumlah 500 KPM penerima UEP tahun 2022) yang telah dilakukan evaluasi pada tahun ini, namun setelah dilakukan evaluasi kembali secara mendetail, terdapat 15 KPM yang diberikan bantuan untuk Pengembangan Usahanya, dengan nominal bantuan Rp.5 juta untuk masing-masing KPM. Total nilai bantuan untuk 15 KPM UEP Pengembangan yaitu Rp. 75 Juta.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

✚ Program Penanganan Bencana

Outcome dari program ini adalah

- Cakupan penanganan korban bencana alam dan sosial sebanyak 54.094 orang
- Cakupan warga masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana 0%

Pelaksanaan Program :

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Sub.Kegiatan : Penyediaan Permakanan

Output:

- Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Layanan Permakanan dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Kewenangan Provinsi sebanyak 54.094 Orang/Jiwa yang tersebar di wilayah kabupaten/kota.

Sub.Kegiatan : Penyediaan Sandang

Output:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan seragam sekolah yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi sebanyak 450 orang

Sub.Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Output:

- Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi pada masa tanggap darurat sebanyak 2 unit

Sub.Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Output:

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi sebanyak 90 orang

Sub.Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial

Output: Terlaksananya pelayanan dukungan psikososial bagi penyintas

✚ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Outcome dari program ini adalah Persentase (%) taman makam pahlawan yang meningkat fungsinya sebagai pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial mencapai 100%

Pelaksanaan Program :

Kegiatan : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Sub.Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Output:

1. Taman Makam Pahlawan (TMP)

Taman Makam Pahlawan (TMP) merupakan makam para pejuang kemerdekaan maupun veteran yang berkontribusi dalam memperjuangkan dan membela kemerdekaan dari penjajah. Taman Makam Pahlawan (TMP) berada di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

2. Makam Pahlawan Nasional (MPN)

Makam Pahlawan Nasional (MPN) merupakan makam Bapak. Nani Wartabone yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Makam Pahlawan Nasional (MPN) berada di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Kedua Makam ini berdasarkan nilai fungsinya telah 100% pemanfaatannya sebagai objek pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, hal ini di tunjukkan dengan adanya kegiatan ziarah momentum hari-hari besar tertentu, yang dilakukan baik oleh TNI/Polri maupun oleh institusi lainnya

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar Rp - (95.94) Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebagai berikut :

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp 8.307.739.661 (98.82);
2. APBD Belanja langsung sebesar Rp. 18.284.278.356,--(94,63%);

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD sebesar Rp 25.511.853.450 (95.94) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program sebesar Rp 26.592.018.017,-
2. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung APBD sebesar Rp. 8.209.659.330 (98.82); dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 8.307.739.661,-

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Selanjutnya, dibawah ini disajikan secara lengkap realisasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024, sebagaimana tabel 3.6 sebagai berikut:

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

TABEL 3.6
Realisasi fisik dan keuangan urusan sosial
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.588.058.797	11.061.630.015	95.46	97.90		
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	827.877.012	826.099.820	99.79	99.95		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	603.414.862	602.214.800	99.80	99.93		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.437.100	11.051.071	96.62	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.078.150	50.039.600	99.92	100		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.946.900	162.794.349	99.93	100		

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.442.289.661	8.343.594.471	98.83	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.307.739.661	8.209.659.330	98.82	100		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.550.000	110.125.911	99.62	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.000.000	23.809.230	99.21	100		
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.040.000	211.836.946	99.90	100		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.100.000	44.020.000	99.82	100		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	111.180.000	111.069.721	99.90	100		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.760.000	56.747.225	99.98	100		
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.030.900	478.946.554	76.63	79.64		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.200.000	13.842.510	65.29	100		

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.169.730	157.890.000	55.96	55.96		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	192.468.100	183.549.400	95.37	100		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.557.420	36.463.752	99.74	100		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.856.200	16.512.100	87.57	100		
	Penyediaan Bahan/Material	9.129.450	6.149.000	67.35	67.69		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.500.000	47.465.992	99.93	100		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.150.000	17.073.800	99.55	100		
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.700.000	715.615.523	91.43	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	172.915.523	72.05	100		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.700.000	542.700.000	100	100		

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.121.224	485.536.701	69.55	83.50		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.267.600	45.911.200	78.79	85.90		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.738.000	229.278.981	63.21	88.73		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.673.624	101.505.420	60.54	60.58		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.442.000	108.841.100	99.45	100		
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.801.075.135	1.791.395.615	99.46	99.87		
a.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	110.598.275	107.896.594	97.56	97.81	-Kurangnya informasi terhadap penyelenggaraan UGB dan penyelenggaraan PUB sehingga tidak mengurus izin	- Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap penyelenggaraan (UGB dan PUB)

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	110.598.275	107.896.594	97.56	97.81		
b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.690.476.860	1.683.499.021	99.59	100		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	74.290.240	74.275.428	99.98	100		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	556.419.986	549.974.208	98.84	98.85		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.059.766.634	1.059.249.385	99.95	100		
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	128.602.000	119.102.510	92.61	93.49		
a.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	128.602.000	119.102.510	92.61	93.49		

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	128.602.000	119.102.510	92.61	93.49		
4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.305.663.720	2.922.490.993	88.41	88.73		
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	589.668.800	370.858.678	62.89	63.57	- Anggaran penyedia permakanaan hanya terealisasi 4 rang dari jumlah target 10. - Adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara keseluruhan karena pelaksanaan layanan nanti dilaksanakan pada bulan September - Bahwa dalam penyediaan obat-obatan melalui e-purchasing, hanya terdapat 1 penyedia, dan ada beberapa obat yang akan disediakan dalam panti tidak tersedia atau tidak sesuai. - Ketidaksesuaian antara sub kegiatan dan pelaksanaan kegiatannya sehingga layanan	- Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan dalam panti bagi penyandang disabilitas terlantar - Untuk memaksimalkan kebutuhan dengan perencanaan yang telah ditetapkan - Perlu adanya tambahan penyedia sehingga banyak pilihan dan terpenuhinya obat-obatan yang telah rencanakan sesuai kebutuhan klien

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

						dapat maksimal	Diperlukan adanya penyesuaian antara sub kegiatan dan pelaksanaan kegiatannya sehingga layanan dapat maksimal
	Penyediaan Permakanan	188.326.000	17.839.200	9.47	11.73		
	Penyediaan Sandang	40.000.000	39.992.150	99.98	100		
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	200.422.800	185.237.800	92.42	92.42		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000	0	0	0		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	98.878.000	71.806.800	72.62	71.88		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	60.042.000	55.982.728	93.24	93.97		

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

b.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.094.369.700	1.087.604.329	99.39	99.72	<p>-Belum tersedianya Panti Sosial Anak Terlantar atau Lembaga Pengasuhan Anak sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam upaya perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar untuk meningkatkan persentase Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial</p>	<p>-Menjalin kerjasama dengan 2 (dua) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu LKSA Al Inayah, Kab. Bone Bolango dan LKSA Darul Mutmain Tabongo untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dasar Anak dalam panti</p>
----	--	----------------------	----------------------	--------------	--------------	--	--

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Penyediaan Makanan	573.350.000	569.809.300	99.38	100		
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.054.000	37.724.125	94.35	94.34		
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	51.800.000	51.485.548	99.39	99.39		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	429.165.700	428.585.356	99.86	99.89		
c.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.282.103.220	1.128.066.538	87.98	88.19		
	Penyediaan Permakanan	300.000.000	224.692.999	74.90	74.94		
	Penyediaan Sandang	100.000.000	86.601.304	86.60	86.61		
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	135.000.000	129.092.920	95.62	95.62		

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	34.745.720	3.999.948	11.51	11.51		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	302.460.000	294.473.130	97.34	94.94		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	289.457.500	288.610.586	99.71	99.71		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	19.540.000	17.992.900	92.08	92.08		
	Pemulasaraan	20.000.000	5.000.000	25	75		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	80.900.000	77.602.751	95.92	95.70		
d.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	339.522.000	335.961.448	98.95	99		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	339.522.000	335.961.448	98.95	99		

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.080.394.875	8.001.348.674	99.02	99.98		
a.	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	50.000.000	48.342.100	96.68	96.68		
	Pengangkatan Anak antar WNI	50.000.000	48.342.100	96.68	96.68		
b.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	8.030.394.875	7.953.006.574	99.04	100		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.848.081.500	5.775.191.091	98.75	100		
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.034.899.375	2.030.474.113	99.78	100	Untuk Bantuan Sosial UEP & PEKKA pada APBD-P tidak dialokasikan biaya untuk - Verifikasi dan Identifikasi - Bimtek - Monitoring	Pada APBD-P untuk bantuan sosial UEP & PEKKA dialokasikan anggaran untuk verifikasi, Bimtek dan Monitoring
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	147.414.000	147.341.370	99.95	99.98	-Pelaksanaan identifikasi administrasi penyandingan nama usulan untuk bantuan sosial di DTKS harus melalui Aplikasi SIKS-NG, sedangkan selama ini	- Adanya akses ke Aplikasi SIKS-NG untuk dapat menyandingkan nama usulan calon penerima bantuan

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

						menggunakan DTKS non aplikasi yang diterbitkan oleh kemensos pada tahun 2022. Untuk melihat DTKS yang UP-DATE, kami tidak memiliki akses ke Aplikasi, akses tersebut hanya dimiliki oleh orang tertentu yang terdaftar di PUSDATIN	
6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.087.432.140	1.016.931.963	93.52	95.52		
a.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.087.432.140	1.016.931.963	93.52	95.52		
	Penyediaan Permakanan	842.235.000	823.449.363	97.77	100		
	Penyediaan Sandang	120.000.000	119.850.000	99.88	100		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	70.197.140	67.531.200	96.20	100		

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	25.000.000	6.101.400	24.41	25		
	Pelayanan Dukungan Psikososial	30.000.000	0	0	100	Anggaran tidak terealisasi tetapi kegiatan fisiknya terlaksana	Kebutuhan psikososial telah terpenuhi dari para donatur
7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	600.791.350	598.948.680	99.69	100		
a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	600.791.350	598.948.680	99.69	100		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	600.791.350	598.948.680	99.69	100		
JUMLAH		26.592.018.017	25.511.853.450	95.94	97.30		

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah berupaya merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja Tahun 2024 untuk tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan khususnya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam bab III dapat dilihat bahwa, nilai capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan dari 1(satu) sasaran strategis dan 3(tiga) indikator kinerja, pencapaian target kinerjanya berada pada kategori baik.

1. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat dengan indicator kinerja Persentase masyarakat miskin dan rentan yang memperoleh perlindungan sosial tahun 2024 dengan realisasi 100% dengan Capaian tahun 2024 sebesar 100%, demikian juga bila dibandingkan dengan target renstra 80%.
2. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat dengan indicator kinerja Persentase PSKS perorangan dan kelembagaan yang meningkat kapasitasnya tahun 2024 dengan realisasi 100% dengan Capaian tahun 2024 sebesar 100%, demikian juga dengan target renstra 100%.
3. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat dengan indicator kinerja Korban Bencana Alam dan Sosial yang terlayani dan tertangani tahun 2024 dengan realisasi 100% dengan Capaian tahun 2024 sebesar 100%, demikian juga dengan target renstra 100%.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

Berdasarkan simpulan tersebut di atas beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk peningkatan kinerjanya ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan peraturan tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan social.
2. Meningkatkan koordinasi antara pihak yang terkait agar pengevaluasian terhadap program-program yang telah dijalankan dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pembinaan kepada PMKS dengan sumberdaya yang ada.
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui usulan penambahan pegawai PNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang lebih profesional baik untuk pegawai PNS dan non PNS.
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
6. Lebih meningkatkan kinerja PNS dan Non PNS untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK